



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Rabu

Tanggal: 29 Maret 2017

Halaman: 2

PERUBAHAN OPD SISAKAN PERSOALAN

Jabatan Direktur RS Jogja Dibahas Ulang

YOGYA (KR) - Jabatan direktur RS Jogja kini terpaksa dibahas ulang. Hal ini berkaitan dengan perubahan organisasi perangkat daerah (OPD) pada awal Januari lalu yang belakangan menimbulkan persoalan. Terutama setelah ada peralihan yang semua jabatan struktural menjadi jabatan fungsional.

"Kami sempat melakukan pendampingan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan direkomendasikan supaya direktur RS Jogja merupakan pejabat struktural, seperti sebelum ada perubahan OPD," ungkap Ketua Komisi D DPRD Kota Yogya, Agung Damar Kusumandaru, Selasa (28/3).

Wakil Ketua Komisi D, Fokki Ardiyanto, juga membenarkan hal tersebut. Fokki meminta supaya penjabat walikota menakar kembali status jabatan direktur RS Jogja tersebut. Pasalnya, saat pelantikan pejabat seiring perubahan OPD awal Januari lalu, jabatan tersebut justru diemban oleh peja-

bat fungsional.

Dalam pendampingannya ke Kemendagri, terdapat dua alasan munculnya rekomendasi agar jabatan direktur RS Jogja dikembalikan ke pejabat struktural. Alasan yang melandasi itu ialah pejabat fungsional tidak bisa menjalankan tugas sebagai kuasa pengguna anggaran, serta struktur kelembagaan RS Jogja masih dalam status quo.

"Dalam perda terkait perombakan OPD, petunjuk teknis untuk pengelolaan RS Jogja sampai sekarang belum terbit. Ini harus menjadi pencermatan supaya tidak berdampak pada pelayanan," urainya.

Sementara Penjabat Walikota Yogya, Sulistiyo, mengatakan sebelum melakukan perombakan organisasi pihaknya juga sempat berkonsultasi ke Kemendagri. Waktu itu dirinya bahkan mengupayakan tetap dijabat oleh pejabat struktural. Namun oleh Kemendagri justru disarankan supaya dijabat oleh pejabat fungsional seperti kepala puskesmas.

Kendati demikian, pihaknya kini harus membahas ulang terkait masukan dari Komisi D tersebut. "Sudah kami limpahkan ke Biro Organisasi serta Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) untuk membahas ulang. Kami juga akan konsultasikan lagi ke Kemendagri," jelasnya.

Menyangkut unsur pelayanan, diakuinya selama ini tidak mengalami persoalan. Begitu pula perihal penganggaran kegiatan. (Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BKPP			

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005